



RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN 2023



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala, Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 telah selesai disusun.

Renja ini disusun untuk memenuhi kewajiban instansi dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur sesuai Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan mengacu kepada SK Kepala LAN yang ditertibkan oleh Lembaga Administrasi Negara (LN-RI). Renja ini diharapkan dapat memberikan motivasi terhadap peningkatan pelaksanaan fungsi dan pelayanan yang lebih efisien, efektif, bersih, transparan dan akuntabel dalam rangka perwujudan pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Rencana kerja ini selain sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan, program dan kebijakan jangka waktu 1 tahun, juga akan menjadi acuan untuk evaluasi kinerja melalui pengukuran kinerja Instansi/Organisasi, berdasar pada data realisasi dan tingkat pencapaian target yang dapat dipertanggung jawabkan baik dilapangan (fisik) maupun secara administrasi.

Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Renja Tahun 2023 ini, semoga Allah Yang Maha Kuasa melindungi kita semua, aamiin.

Malli, 24 Maret 2022
KEPALA DINAS,

Drs. H. Hamris Darwis
NIP. 19641119 199003 1 008



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	4
1.3. Maksud dan Tujuan.....	8
1.4. Sistem Penulisan.....	8
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU	11
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu (2021) dan Capaian Renstra SKPD.....	11
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	26
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.....	30
2.4. Reviuw Terhadap Rancangan Awal RKPD	33
2.5. Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	33
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	34
3.1. Telaahan Kebijakan Nasional.....	34
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD.....	34
3.3. Program dan Kegiatan.....	36

BAB IV.	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	38
BAB V	PENUTUP	39
LAMPIRAN	40

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan merupakan hal yang sangat diperlukan untuk memajukan suatu bangsa dan menilai berhasilnya suatu pemerintahan. Untuk menjalankan pembangunan tersebut sangatlah diperlukan perencanaan yang menurut ilmu manajemen diartikan sebagai suatu proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan serta mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Perencanaan dalam suatu organisasi merupakan suatu proses awal yang saling berkaitan dengan proses-proses berikutnya, karena tanpa perencanaan maka fungsi-fungsi lain (pengorganisasian, pengarahan dan pengontrolan) tidak dapat berjalan.

Rencana kerja SKPD yang selanjutnya disingkat RENJA SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Penyusunan Renja merupakan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dimana disebutkan bahwa penyusunan Renja berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra SKPD) dan mengacu pada RKPD, memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

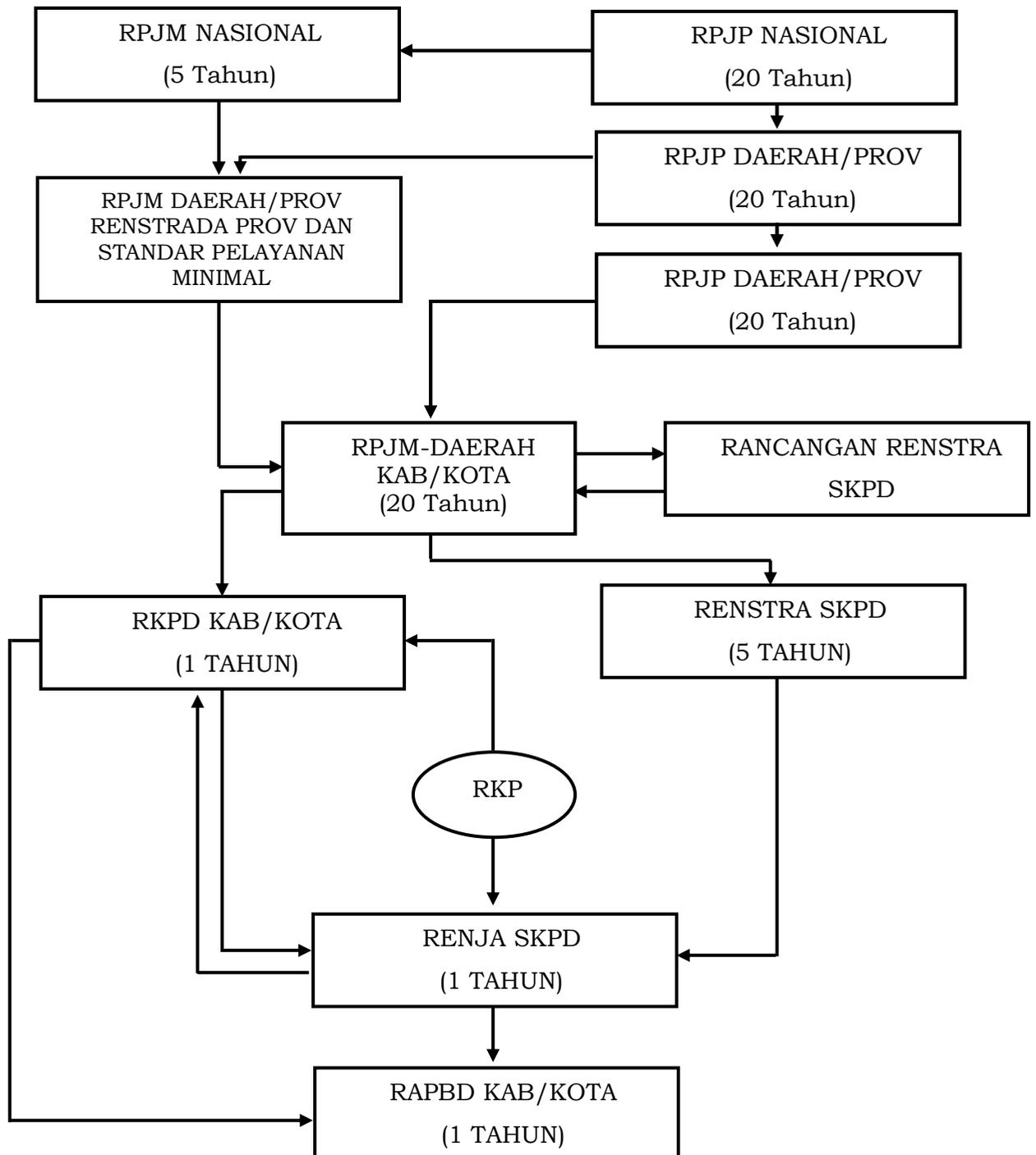
Renja mempunyai fungsi penting dalam system perencanaan daerah, karena Renja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD) dan Renstra SKPD ke dalam rencana, program dan penganggaran tahunan. Renja menjembatani

sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis kedalam langkah-langkah tahunan yang lebih kongkrit dan terukur.

Renja SKPD merupakan perencanaan tahunan yang mengacu pada Renstra SKPD yang memuat tentang strategi dan kebijakan yang tertuang dalam program dan kegiatan prioritas seperti yang tertuang dalam rancangan awal RPJMD sebagai input RKPD yang nantinya akan tertuang dalam rencana kerja dan anggaran (RKA) sebagai pedoman penyusunan APBD.

Renja SKPD sangat terkait dengan Renstra yang merupakan penjabaran dari program dan kegiatan prioritas sebagai pelaksanaan visi dan misi yang memuat sasaran kinerja dengan pagu indikatif dan pendanaan dengan perkiraan maju di tahun-tahun berikutnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa Renja SKPD merupakan penjabaran tahunan yang dikumpulkan akan tersusun Renstra. Dengan demikian Renja merupakan pedoman bagi penyusun rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama-sama antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) dengan pemerintah. Hubungan Renja dengan dokumen perencanaan lainnya dapat digambarkan pada bagan berikut ini :

BAGAN HUBUNGAN RENJA SKPD
DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA



1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21,Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 5103);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 Tentang Organisasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 114);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 42);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 52);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 3);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Dalam Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerahserta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Dalam Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Dalam Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur nomor 10 tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012 Nomor 10) Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 70);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur nomor 3 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 02 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 nomor 11);
15. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Kabupaten Luwu Timur;
16. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur;
17. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2023;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan arah bagi seluruh jajaran manajemen Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur dalam melaksanakan program, kegiatan dan Sub Kegiatan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat;
- b. Sebagai dokumen perencanaan satu tahun guna membangun kinerja yang lebih akuntabel pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur adalah :

- a. Penjabaran tahunan dari perencanaan strategis yang tertuang dalam Renstra sebagai penjabaran visi, misi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur;
- b. Sebagai acuan untuk pelaksanaan program dan kegiatan prioritas Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, di susun seperti berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan Renja.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini menguraikan tentang kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah lalu (tahun n-2) mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan renja perangkat daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra perangkat daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan renja perangkat daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu, dan realisasi renstra perangkat daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan perangkat daerah dan/atau realisasi APBD untuk perangkat daerah yang bersangkutan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja perangkat daerah, serta program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah pada tahun rencana.

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu (2021) dan Capaian Renstra SKPD

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian merupakan unit Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terbentuk melalui Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103).

Evaluasi atas pelaksanaan Renja Perangkat Daerah bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, serta mengidentifikasi realisasi pencapaian target indikator yang telah ditetapkan dalam RPJMD Pemerintah Daerah dan Renstra yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahun sesuai dengan besaran indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian tahun 2021 mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan atau realisasi APBD Dinas Kominfo SP. Pada Tahun 2021 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian melaksanakan 5 program, 14 kegiatan dan 38 Sub Kegiatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 8.305.453.719

atau sebesar 92,76 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 8.953.467.939 yang terdiri atas belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.243.084.246,- atau sebesar 93,37% dari pagu anggaran sebesar Rp. 2.402.393.390,- dan belanja langsung sebesar Rp. 6.062.369.473,- atau sebesar 92,54% dari pagu anggaran sebesar Rp. 6.551.074.549,-. Untuk lebih jelasnya kinerja Diskominfo pada tahun 2019, 2020 dan 2021 dapat disajikan pada lampiran **tabel 1** sebagai berikut :

Tabel 1

**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2021**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output)/Kegiatan (Outcome)	Target capaian kinerja 2019	Realisasi target kinerja tahun 2019	Target capaian kinerja Tahun 2020	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020	Target capaian kinerja Tahun 2021	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2021	Realisasi capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan s/d Tahun 2021	Persentase Capaian Realisasi target s/d Tahun 2021 (%)	SKPD Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11 <i>(Jumlah Capaian Target/Jumlah target x 100)</i>	12
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata pencapaian pelayanan administrasi perkantoran	90%	90%	95%	95%	95%	95%		100%	
2.16.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	Diskominfo SP
2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	2	2	2	2	2	2	6	100	Diskominfo SP
2.16.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	2	2	2	2	2	2	6	100	Diskominfo SP

2.16.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	2	2	2	2	2	2	6	100	Diskominfo SP
2.16.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	8	8	8	8	8	8	24	100	Diskominfo SP
2.16.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%			Diskominfo SP
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai/PNS yang dibayarkan Gaji dan Tunjangan	20	20	20	20	21	21	61	100	Diskominfo SP
2.16.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun (Dokumen)	18	18	18	18	18	18	54	100	Diskominfo SP
2.16.01.2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%			Diskominfo SP
2.16.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang tersusun	2	2	2	2	2	2	6	100	Diskominfo SP
2.16.01.2.04	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Kewenangan PD (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%			Diskominfo SP
2.16.01.2.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen kebijakan retribusi daerah yang tersusun	1	1	1	1	1	1	3	100	Diskominfo SP

2.16.01.2.04.062	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Retribusi Menara Telekomunikasi yang menjadi obyek retribusi	135	135	141	141	140	140	416	100	Diskominfo SP
2.16.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai PD yang dilayani (%)	100%	95%	100%	0	100%	100%			Diskominfo SP
2.16.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dinas Komunikasi dan Informatika)	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian yang tersusun dan dikelola	12	12	12	12	12	12	36	100	Diskominfo SP
2.16.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	10	10	23	0	9	9	19	59,37	Diskominfo SP
2.16.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar (%)	100%	87%	100%	97%	100%	97%			Diskominfo SP
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Alat Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor yang disediakan	30	27	3	2	3	2	31	86,11	Diskominfo SP
2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	2	2	2	2	2	2	6	100	Diskominfo SP
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	Jumlah Barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan (jenis)	2	2	2	2	2	2	6	100	Diskominfo SP
2.16.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Dinas Komunikasi dan Informatika)	Jumlah Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	60	60	60	60	60	60	180	100	Diskominfo SP

2.16.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu (Dinas Komunikasi dan Informatika)	Jumlah tamu yang difasilitasi (Orang)	35	35	30	30	20	20	85	100	Diskominfo SP
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dilaksanakan	114	106	114	114	103	103	323	97,58	Diskominfo SP
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase rata-rata pencapaian pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	98%	100%	100%			Diskominfo SP
2.16.01.2.07.05	Pengadaan Mebel (Dinas Komunikasi dan Informatika)	Jumlah mebel kantor yang diadakan	7	7	8	6	5	5	18	90	Diskominfo SP
2.16.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	18	18	25	25	36	36	79	100	Diskominfo SP
2.16.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diadakan	10	10	10	10	2	2	22	100	Diskominfo SP
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%			Diskominfo SP
2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dinas Komunikasi dan Informatika)	Jumlah surat masuk dan keluar yang diagenda	105	105	105	105	103	103	313	100	Diskominfo SP
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa komunikasi, air dan listrik yang dibayarkan	36	36	36	36	24	24	96	100	Diskominfo SP

2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum Kantor yang dibayarkan	18	18	24	24	30	30	72	100	Diskominfo SP
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%			Diskominfo SP
2.16.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara	6	6	6	6	7	7	19	100	Diskominfo SP
2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Kantor yang dipelihara	26	26	22	22	20	20	68	100	Diskominfo SP
2.16.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung dan Bangunan Kantor yang terpelihara	2	2	2	2	2	2	6	100	Diskominfo SP
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah yang dipublikasikan	100%	100%	100%	50%	100%	100%		100%	Diskominfo SP
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah yang dikelola	100%	100%	100%	50%	100%	100%			Diskominfo SP
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	jumlah saluran komunikasi dan informasi yang dikelola	5	5	5	0	5	5	10	66	Diskominfo SP

2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	jumlah PPID yang mengikuti sosialisasi	39	39	39	0	166	166	205	84	Diskominfo SP
2.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media	jumlah mass media yang menyebarluaskan informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah	26	26	26	26	26	26	68	100	Diskominfo SP
2.16.02.2.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	jumlah pengurus berjenis kelamin perempuan dalam kelompok informasi masyarakat yang dibina	71	71	71	0	71	71	142	66	Diskominfo SP
2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	jumlah organisasi yang terlibat dalam penyebaran informasi	3	3	3	3	3	3	9	100	Diskominfo SP
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	persentase OPD yang memanfaatkan telematika									Diskominfo SP
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	persentase pengelolaan nama domain pemerintahan daerah	95%	79%	100%	100%	100%	100%		100%	Diskominfo SP
2.16.03.2.01.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah nama domain dan sub domain yang dibina dalam pengelolaan konten website	-	-	-	-	39	39	39	100	Diskominfo SP

2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Jaringan Internet yang dikembangkan dan dipelihara lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur	100	79	202	202	49	49	330	94,01	Diskominfo SP
2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	persentase pengelolaan pemerintahan berbasis e-governmet yang dikelola	100%	100%	100%	100%	100%	100%			Diskominfo SP
2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah aplikasi E-Government yang dikembangkan (Aplikasi)	4	4	5	5	4	4	13	100	Diskominfo SP
2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	jumlah aplikasi yang mendukung program smart city luwu timur	-	-	-	-	-	-	-	-	Diskominfo SP
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data statistik dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah	100%	50%	100%	50%	100%	100%			Diskominfo SP
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	persentase data statistik sektoral kabupaten yang tersusun	100%	50%	100%	50%	100%	100%			Diskominfo SP
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah data /informasi/ statistik sektoral daerah yang tersusun	12	12	12	12	210	210	234	100	Diskominfo SP
2.20.02.2.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah dokumen pengelolaan data perencanaan pembangunan daerah	-	-	50	-	50	50	50	50	Diskominfo SP
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK	Persentase Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Diskominfo SP

	PENGAMANAN INFORMASI	pemerintahan daerah yang diselenggarakan										
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelenggaraan pengamanan data dan informasi elektronik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Diskominfo SP
2.21.02.2.01.04	Penyediaan Keamanan Informasi Pemerintah Kabupaten/Kota	Layanan Informasi Jumlah Perangkat, Aplikasi dan Informasi yang diamankan	1	1	1	1	26	26	28	100%		Diskominfo SP

Dari tabel diatas dapat dijelaskan beberapa hasil analisa sebagai berikut:

➤ **Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Hasil capaian kinerja menunjukkan bahwa program **Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** dari tahun 2019-2021 teralisasi sebesar 100%. Pencapaian ini tak lepas dari komitmen yang telah dituangkan dalam perjanjian kinerja sehingga mengharuskan semua pegawai yang telah melakukan perjanjian kinerja untuk bekerja guna mencapai target yang telah ditetapkan. Selain itu, pada tahun 2021 ada perubahan nama program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan amanah **Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah** sehingga beberapa program pada Tahun sebelumnya dilebur menjadi satu program yakni program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota yang didalamnya terdapat beberapa kegiatan dan sub kegiatan. Pada Tahun 2021 Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan 5 Program, 14 Kegiatan dan 37 Sub kegiatan. Adapun pada program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kan/Kota mempunyai 9 Kegiatan yang semuanya dilaksanakan oleh Sekretariat sebagai upaya peningkatan nilai Lakip. Adapun 9 Kegiatan beserta capaian kerjanya Tahun 2021 adalah:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan persentase capaian pada Tahun 2021 sebesar 100%.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan persentase capaian kinerja pada Tahun 2021 sebesar 100%.
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan persentase capaian kinerja pada Tahun 2021 sebesar 100%.
4. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah dengan persentase capaian kinerja pada Tahun 2021 sebesar 100%.
5. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan persentase capaian kinerja pada Tahun 2021 sebesar 100%.
6. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan persentase capaian kinerja pada Tahun 2021 sebesar 97%.
7. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan persentase capaian kinerja pada Tahun 2021 sebesar 100%.
8. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan persentase capaian kinerja pada Tahun 2021 sebesar 100%.
9. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan persentase capaian kinerja pada Tahun 2021 sebesar 100%.

➤ **Program Informasi Dan Komunikasi Publik**

Dari rentan tahun 2019-2021 realisasi kinerja program ini mengalami penurunan pada Tahun 2020 dikarenakan masih berlakunya pembatasan kegiatan sosial akibat pandemi Covid-19 sehingga berdampak pada penundaan pelaksanaan kegiatan dan pada triwulan IV Tahun 2021 beberapa anggaran sub kegiatan pada

program ini direcofusing karena tidak memungkinkan untuk dilaksanakan. program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik juga baru dilaksanakan pada Tahun 2021 setelah berlakunya permendagri 90 tahun 2019. Adapun jumlah kegiatan yang dilaksanakan pada program ini hanya 1 kegiatan sedangkan untuk sub kegiatan berjumlah 5 sub kegiatan. Adapun realisasi kegiatan pada program ini pada tahun 2021 yakni:

1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan persentase capaian kinerja pada Tahun 2021 sebesar 100%.

➤ **Program Aplikasi Informatika**

Program ini adalah program yang masuk dalam KP 1 Dinas Kominfo SP Tahun 2021-2026 karena program ini yang mengakomodir penyediaan layanan internet di Ruang Publik, OPD, Puskesmas, BPP dan Rumah Jabatan . Selain itu, program ini juga mengakomodir penyediaan aplikasi dan website yang dikelola oleh seluruh OPD yang ada di Kabupaten Luwu Timur. Dan pada tahun 2021 realisasi kinerja dari program ini sebesar 100%. Adapun rincian rencana dan realisasi capaian kinerja adalah OPD terkoneksi internet (target 41, terealisasi 41), Ruang Publik (target 21, terkoneksi internet 21), Puskesmas (target 11, realisasi 11), BPP (target 9 realisasi 9), Rumah Jabatan (target 14 realisasi 14), dan Aplikasi E-Government (target 4 realisasi 16).

➤ **Program Informasi dan Komunikasi Publik**

Pada tahun 2021 indikator kinerja yang digunakan pada kegiatan Penyebarluasan informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah Persentase informasi daerah yang dipublikasikan, Adapun realisasi program ini tahun 2021 terbilang sangat tinggi yakni mencapai 100% atau 8600 informasi. Program ini mempunyai 1 kegiatan dan 5 sub kegiatan.

➤ **Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral**

Program ini mempunyai 1 Kegiatan yakni kegiatan Penyelenggaraan Statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten/kota daerah dan 2 sub kegiatan yakni sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral dan Membangun Metadata Statistik Sektoral. Sasaran program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan indikator kinerja program yaitu persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data statistik dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang diukur dengan menghitung jumlah dokumen pembangunan daerah yang terpublikasi, realisasi indikator sasaran program tahun 2022 sebanyak 14 Dokumen atau sebesar 100% dari target 14 Dokumen. adapun upaya yang dilakukan untuk menyusun dokumen yang memuat data kabupaten Luwu Timur adalah dengan kerjasama dengan pihak Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur sebagai upaya untuk menghasilkan data/ dokumen yang valid. penyusunan data statistik sektoral ini tidak hanya dilakukan oleh Dinas Kominfo SP tapi melibatkan beberapa OPD dan juga Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Luwu

Timur sehingga diharapkan kolaborasi ini mampu menghasilkan suatu data/dokumen yang valid sesuai dengan kondisi yang terjadi di daerah. adapun lokus OPD yang ditargetkan menjadi pengguna data statistik daerah dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah adalah, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pertanian dan Dinas Kesehatan. pada pelaksanaan penyusunan data statistik sektoral yang melibatkan BPS Luwu Timur ada beberapa kendala yang dihadapi seperti keterbatasan anggaran operasional, keterbatasan sumber daya manusia bidang statistik dan juga sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan.

➤ **Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi**

Berdasarkan hasil capaian kinerja tahun 2021 Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi ini telah terealisasi sebesar 100%. Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bertujuan untuk mendukung sistem keamanan aplikasi/website dan perangkat server yang berada di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur. Target output kegiatan adalah Jumlah Sistem Elektronik (Aplikasi) yang diamankan dan terealisasi sebanyak 10 Sistem Elektronik (Aplikasi) atau (100%) dan Adapun realisasi keuangannya 99,67%. Adapun Aplikasi yang diamankan, yaitu: Beasiswa, Pelayanan Terintegrasi, Tower Map, e-Kominfo Surat, Kominfo Cloud, SIOLOMAS, SIGAP SARPRAS RSUD I LAGALIGO, WEBSITE RSUD, SI HEMAT, SI PATUH, PERIKSA KI,

SINAGA JAKON, La Cuti, Pembangunan Surat Keterangan, APLIKASI SENTUH HATI LUTIM, dan Aplikasi SIYANTI.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Secara umum Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2021 dapat diamati dengan cara mengkaji antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana kerja sasaran yang hendak dicapai dengan realisasi kinerja organisasi. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang. Hal ini bermanfaat dalam memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana suatu organisasi telah mewujudkan misi yang telah ditetapkan.

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah berisi tentang kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Analisis kinerja pelayanan Diskominfo SP Kab. Luwu Timur dalam menilai keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian kinerja menggunakan Indikator Kinerja Kunci sesuai dengan sasaran target yang ada dalam Renstra Tahun 2021-2026. Untuk lebih jelasnya lihat **tabel 2** sebagai berikut :

Tabel. 2
Indikator Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2021 - 2026

No.	INDIKATOR	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH					REALISASI CAPAIAN			CATATAN ANALISIS
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6		7	8		11
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2.0	2.25	2.50	2.75	2.85	-			
2	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	80	85	87	88	90	83			
3	Nilai SAKIP	62	63	64	65	67	64,40			

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa :

a. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Formulasi indikator yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah Nilai akhir dari hasil evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dilakukan Kementerian Pendayagunaan Apratur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN RB). penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2021 tidak diikuti oleh pemerintah kabupaten luwu timur karena dokumen spbe belum ada.

b. Nilai Keterbukaan Informasi Publik

Formulasi indikator yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah sebagai berikut : "(Nilai akhir dari penilaian Komisi Informasi (KI) Provinsi Sulawesi Selatan). Berdasarkan tabel diatas, realisasi kinerja Nilai Keterbukaan Informasi Publik pada Tahun 2021 melampaui target yang ditetapkan dimana target nilai 80 dan realisasinya mencapai diangka 83 dengan predikat menuju INFORMATIF. Pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian menyebarluaskan informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bentuk rilis berita, Infografis, Videografis, Advertorial, Video dan foto. Informasi tersebut di sebarluaskan melalui media cetak, media online, media televisi, media sosial dan videotron. Selain itu, informasi juga disebarluaskan dalam bentuk majalah dan Koran. Pada Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Luwu Timur bekerjasama

dengan 9 Media Cetak (Fajar, Tribun Timur, Sindo, Ujungpandang Ekspres, Berita Kota Makassar, Seruya, Radar Luwu Raya, Rakyat Sulsel dan Palopo Pos), 16 Media Online antara lain : bayangkaraneews.com, mediata.id, teraskata.co.id, batarapos.com, Lutimterkini.com, Lutimnews.com, kabarlutim.com, eksposdemokrasi.com, luwuraya.com, beritalutim.com, radarluwuraya, com, okson.id, liputan4.com, sinyaltajam.com, dan sawerigading news.com. Dengan memaksimalkan SDM yang ada dan menambah jumlah media partner, maka target 7200 informasi yang harus dipublikasikan untuk Tahun 2021 telah terealisasi, adapun rata-rata capaian kinerjanya **Sangat Tinggi** sebesar **100%** yang terealisasi 7200 informasi yang dipublikasikan Tahun 2021, dengan hitungan = ($7.200/7.200 \times 100 = 100\%$).

c. Prestasi Nilai LAKIP

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Sakip Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan persandian Tahun 2021 oleh Inspektorat diperoleh nilai skor 64,40 dengan peringkat B. Dari hasil evaluasi diketahui terdapat beberapa hal yang dianggap perlu mendapat penyempurnaan, yaitu :

- Laporan kinerja belum menyajikan data pembandingan realisasi tahun yang lalu
- Belum dilakukan secara optimal dalam mengevaluasi pencapaian kinerja.

Sehubungan dengan perubahan nomenklatur perencanaan pembangunan dan evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

yang sebelumnya menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan sekarang beralih menggunakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, pada dasarnya tidak mempengaruhi susunan program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian karena setelah dilakukan telaahan terhadap kedua nomenklatur tersebut, program dan kegiatan pada urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian tidak mengalami perubahan secara signifikan hanya saja ada beberapa program yang digabung menjadi satu program.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang mengurus urusan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian menghadapi sejumlah masalah antara lain :

1. Bidang TELEMATIKA
 - Terbatasnya jumlah SDM yang menguasai teknisi jaringan.
 - Terbatasnya alokasi anggaran yang disediakan dalam mendukung pengembangan dan pemeliharaan jaringan yang ada di masing-masing OPD dan Ruang Publik.

- Tidak adanya Kendaraan operasional untuk mengangkut alat alat video converence untuk kegiatan yang bersifat virtual.
2. Bidang APTIKA
- Terbatasnya SDM yang menguasai komunikasi dan informatika khususnya di bidang IT guna mendukung pembuatan dan pengelolaan aplikasi;
 - Terbatasnya anggaran yang dilakokasikan untuk kegiatan Bidang APTIKA;
 - Terbatasnya alat alat pendukung pembuatan aplikasi yakni computer dengan spesifikasi yang tinggi; dan
 - Belum adanya dasar hukum untuk penggunaan apliakasi yang telah dibuat.
3. Bidang IKP
- Terbatasnya anggaran yang dilakokasikan untuk kegiatan Bidang IKP;
 - Sumber daya manusia yang masih sangat kurang utamanya yang terkait dengan Keterampilan penulisan berita (Rilis) dan design grafis;
 - Penyebaran informasi pembangunan daerah melalui Medis Sosial belum maksimal karena kurangnya tenaga yang khusus menangani pengelolaan media social;
 - Fasilitas pendukung kegiatan bidang IKP masih minim utamanya fasilitas untuk media center seperti Komputer/laptop untuk mendukung pekerjaan Jurnalis; dan
 - Masih rendahnya kompetensi Jurnalis dalam penulisan berita serta pemahaman terhadap isu-isu pembangunan sebagai akibat Jurnalis

bersangkutan belum memiliki sertifikat Uji Kompetensi wartawan, sehingga untuk TA 2021 – 2026 diusulkan adanya penambahan anggaran untuk kegiatan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) pada seluruh tingkatan Muda, Madya dan Utama.

4. Urusan STATISTIK

- Sumber daya manusia yang masih sangat kurang utamanya yang terkait dengan pengelola data statistic dan design grafis data statistic;
- Belum ada tersedia fasilitas pendukung atau penunjang untuk kegiatan Statistik; dan
- Keterlambatan data dari beberapa OPD untuk diolah menjadi data statistic daerah.

5. Urusan PERSANDIAN

- Infrastruktur yang mendukung persandian dan keamanan informasi masih kurang;
- Belum adanya regulasi tentang pola hubungan komunikasi sandi dan standar Keamanan Informasi yang ditetapkan; dan
- Sumber daya manusia (SDM) di bidang persandian dan keamanan informasi masih kurang.

6. Bidang SEKRETARIAT

- Terbatasnya pegawai di bidang sekretariat; dan
- Kurangnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan sekretariat.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan rancangan awal dengan hasil analisis kebutuhan kegiatan. Review dilakukan dalam rangka menyesuaikan usulan renja dengan kebutuhan tahun 2023. Hasil review terhadap rancangan awal RKPD dan Renja Dinas Kominfo SP Tahun 2023 disajikan di **tabel 3** pada Lampiran dokumen Renja ini.

2.5. Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tahapan Penyusunan Renja perangkat daerah 2023 adalah dengan mengakomodir program / kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi, maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi perangkat daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan. Secara umum tidak ada usulan program dan kegiatan masyarakat pada kegiatan musrenbang dan forum organisasi perangkat daerah yang terkait langsung dengan tupoksi Dinas Kominfo SP.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Kebijakan Nasional

Dari hasil telaahan terhadap kebijakan nasional urusan komunikasi dan informatika sesuai dengan renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020-2024, ada 5 (lima) dari 9 (sembilan) sasaran strategis Kemenkominfo yang masuk dalam rencana program kerja Dinas Kominfo untuk periode 2021-2026 yakni:

1. Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau;
2. Meningkatnya pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis;
3. Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital;
4. Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah; dan
5. Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi public

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.2.1. Tujuan Renja

Secara umum tujuan penyusunan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur adalah untuk memberikan gambaran mengenai kebijakan, program dan kegiatan, beserta indikator kinerja dan pagu infikatif masing-masing program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur sampai akhir Tahun 2023

mendatang. Adapun Tujuan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 yaitu :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan, dan
2. Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Layanan Urusan Perangkat Daerah.

3.2.2. Sasaran Renja

Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Sasaran akan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Adapun sasaran Renja 2023 adalah :

1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis elektronik
2. Meningkatnya keterbukaan Informasi Publik dan
2. Meningkatnya Nilai Sakip Kominfo

Tujuan dan sasaran Renja Dinas Kominfo Tahun 2023 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel. 4

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatkan tata kelola Pemerintahan	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,50
		Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	Meningkatnya keterbukaan Informasi Publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	87

2.	Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Layanan Urusan Perangkat Daerah	Nilai Sakip dinas Kominfo	Meningkatnya Nilai Sakip Kominfo	Nilai Sakip	64
----	--	---------------------------	----------------------------------	-------------	----

3.3. Program dan Kegiatan

Dalam rangka mewujudkan target sasaran renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2023, akan dilaksanakan beberapa program dan kegiatan antara lain :

a). Sasaran : *Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis elektronik*

1. Program Aplikasi Informatika, dengan kegiatan :

- Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Adapun sub kegiatannya adalah:

1. Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

- Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Adapun sub kegiatannya adalah:

1. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
2. Pengembangan dan Pengelolaan ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas

2. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, dengan kegiatan:

- Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota. Adapun sub kegiatannya adalah:

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral

2. Membangun Metadata Statistik Sektoral
3. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, adapun sub kegiatannya adalah:
 1. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

b). Meningkatnya keterbukaan Informasi Publik

1. Program Informasi dan Komunikasi Publik, dengan kegiatan :
 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, adapun sub kegiatannya adalah:
 1. Pengelolaan Media Komunikasi Publik
 2. Pelayanan Informasi Publik
 3. Layanan Hubungan Media
 4. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
 5. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas

c). Sasaran : Meningkatnya Nilai Sakip Kominfo

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan :
 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada Tahun 2023 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo-SP) direncanakan melaksanakan 5 program, 14 kegiatan dan 38 sub kegiatan dengan pagu anggaran Rp. 11.544.000.000,-. Alokasi Program dan kegiatan serta indikasi pendanaan Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo-SP) Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada lampiran **tabel. 5** :

BAB V

PENUTUP

Sebagaimana amanat dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan dan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Paragraf 4 perihal Penetapan Renja SKPD. Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur memuat tujuan, sasaran, kebijakan, program serta kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan akan berpedoman pada visi misi kepala daerah Kabupaten Luwu Timur, RPJMD, RKPD, Renstra, Renja, DPA Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 ini dibuat dan diharapkan akan menjadi pedoman semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, sehingga seluruh program dan kegiatan akan dapat dilaksanakan secara terukur, terarah, efektif dan efisien.

Malili, 24 Maret 2022

Kepala Dinas,



Drs. H. Hamris Darwis

Pangkat: Pembina Utama Muda /IV.c

NIP. 19641119 199003 1 008

LAMPPIRAN

TABEL 3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPd PERUBAHAN TAHUN 2023

KODE	RANCANGAN AWAL RKPd					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Diskominfo	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan sesuai standar (%)	100%	5.305.500.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Diskominfo	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan sesuai standar (%)	100%	4.949.000.000	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Diskominfo	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu (%)	100%	107.500.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Diskominfo	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu (%)	100%	107.500.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Diskominfo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	3 Dok	55.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	3 Dok	55.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Diskominfo	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	2 Dok	3.750.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Diskominfo	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	2 Dok	3.750.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Diskominfo	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	2 Dok	3.750.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Diskominfo	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	2 Dok	3.750.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Diskominfo	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	8 dok	45.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	8 dok	45.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Diskominfo	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik (%)	100%	3.100.000.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Diskominfo	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik (%)	100%	3.100.000.000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Diskominfo	Jumlah Pegawai/PNS yang dibayarkan Gaji dan Tunjangan	100%	3.045.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Diskominfo	Jumlah Pegawai/PNS yang dibayarkan Gaji dan Tunjangan	100%	3.045.000.000	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Diskominfo	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun (Dokumen)	18 Dok	55.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Diskominfo	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun (Dokumen)	18 Dok	55.000.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Diskominfo	Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar (%)	100%	22.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Diskominfo	Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar (%)	100%	22.000.000	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Diskominfo	Jumlah Dokumen Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang tersusun	2 Dok	22.000.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Diskominfo	Jumlah Dokumen Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang tersusun	2 Dok	22.000.000	
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Diskominfo	Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Kewenangan PD (%)	100%	115.000.000	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Diskominfo	Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Kewenangan PD (%)	100%	115.000.000	
	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Diskominfo	Jumlah Dokumen Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Kebijakan Retribusi Daerah yang disusun	1 Dok	65.000.000	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Diskominfo	Jumlah Dokumen Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Kebijakan Retribusi Daerah yang disusun	1 Dok	65.000.000	
	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Diskominfo	Jumlah dokumen laporan penetapan wajib retribusi daerah (Dokumen)	1 Dok	50.000.000	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Diskominfo	Jumlah dokumen laporan penetapan wajib retribusi daerah (Dokumen)	1 Dok	50.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Diskominfo	Persentase Pegawai PD yang dilayani (%)	100%	225.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Diskominfo	Persentase Pegawai PD yang dilayani (%)	100%	75.000.000	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dinas Komunikasi dan Informatika)	Diskominfo	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian yang tersusun dan dikelola	12 Dok	25.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dinas Komunikasi dan Informatika)	Diskominfo	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian yang tersusun dan dikelola	12 Dok	25.000.000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Diskominfo	Jumlah ASN yang melaksanakan Bimbingan teknis Impelementasi Peraturan Perundang-Undangan	22 org	200.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Luwu Timur	Jumlah ASN yang melaksanakan Bimbingan teknis Impelementasi Peraturan Perundang-Undangan	22 org	50.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Diskominfo	Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar (%)	100%	565.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Diskominfo	Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar (%)	100%	369.500.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Diskominfo	Jumlah Alat Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor yang disediakan	8 jenis	25.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Diskominfo	Jumlah Alat Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor yang disediakan	8 jenis	25.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Diskominfo	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	5 jenis	13.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Diskominfo	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	5 jenis	13.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Diskominfo	Jumlah Barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan (jenis)	2 jenis	22.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Diskominfo	Jumlah Barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan (jenis)	2 jenis	22.000.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Dinas Komunikasi dan Informatika)	Diskominfo	Jumlah Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-Udangan yang disediakan	60 eks	5.000.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Dinas Komunikasi dan Informatika)	Diskominfo	Jumlah Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-Udangan yang disediakan	60 eks	5.000.000,00	

	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Diskominfo	Jumlah tamu yang difasilitasi (Orang)	50 org	50.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Diskominfo	Jumlah tamu yang difasilitasi (Orang)	50 org	17.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Diskominfo	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dilaksanakan	45 kali	450.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Luwu Timur	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dilaksanakan	45 kali	287.500.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Diskominfo	pesentase pengadaan barang milik daerah yang diadakan	100%	280.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Diskominfo	pesentase pengadaan barang milik daerah yang diadakan	100%	485.000.000	
	Pengadaan Mebel (Dinas Komunikasi dan Informatika)	Diskominfo	Jumlah Mebel yang disediakan	9 unit	15.000.000	Pengadaan Mebel (Dinas Komunikasi dan Informatika)	Diskominfo	Jumlah Mebel yang disediakan	9 unit	15.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Diskominfo	Jumlah Peralatan dan Mesin yang disediakan	7 unit	55.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Diskominfo	Jumlah Peralatan dan Mesin yang disediakan	7 unit	55.000.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Diskominfo	Jumlah Sarana dan Prasaran Gedung kantor dan Bangunan lainnya yang disediakan	3 unit	210.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Luwu Timur	Jumlah Sarana dan Prasaran Gedung kantor dan Bangunan lainnya yang disediakan	3 unit	415.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Diskominfo	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100%	465.000.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Diskominfo	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100%	379.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dinas Komunikasi dan Informatika)	Diskominfo	Jumlah kegiatan jasa surat menyurat yang terlaksana	250 kali	5.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dinas Komunikasi dan Informatika)	Diskominfo	Jumlah kegiatan jasa surat menyurat yang terlaksana	250 kali	5.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Diskominfo	Jumlah rekening jasa air dan listrik yang dibayarkan	24 rek	110.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Diskominfo	Jumlah rekening jasa air dan listrik yang dibayarkan	24 rek	110.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Diskominfo	Jumlah jasa pelayanan umum Kantor yang dibayarkan	13 org	350.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Diskominfo	Jumlah jasa pelayanan umum Kantor yang dibayarkan	13 org	264.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Diskominfo	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik (%)	100%	426.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Diskominfo	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik (%)	100%	296.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Diskominfo	Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara	100%	36.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Diskominfo	Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara	100%	36.000.000	

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Diskominfo	Jumlah Peralatan dan Mesin Kantor yang dipelihara	100%	240.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Diskominfo	Jumlah Peralatan dan Mesin Kantor yang dipelihara	100%	240.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Diskominfo	Jumlah Gedung dan Bangunan Kantor yang terpelihara	100%	150.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Diskominfo	Jumlah Gedung dan Bangunan Kantor yang terpelihara	100%	20.000.000	
	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Diskominfo	Persentase informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah yang dipublikasikan	100%	3.170.000.000	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Kab. Luwu Timur	Persentase informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah yang dipublikasikan	100%	2.850.000.000	
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo	Persentase informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah yang dikelola	100%	3.170.000.000,00	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Luwu Timur	Persentase informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah yang dikelola	100%	2.510.000.000,00	
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Diskominfo	jumlah saluran komunikasi dan informasi yang dikelola	5 saluran	160.000.000	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kab. Luwu Timur	jumlah saluran komunikasi dan informasi yang dikelola	5 saluran	80.000.000	
	Pelayanan Informasi Publik	Diskominfo	jumlah PPID yang mengikuti sosialisasi	166 orang	80.000.000	Pelayanan Informasi Publik	Kab. Luwu Timur	jumlah PPID yang mengikuti sosialisasi	166 orang	80.000.000	
	Layanan Hubungan Media	Diskominfo	jumlah mass media yang menyebarluaskan informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah	26 media	2.500.000.000	Layanan Hubungan Media	Kab. Luwu Timur	jumlah mass media yang menyebarluaskan informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah	26 media	2.100.000.000	
	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Diskominfo	jumlah pengurus berjenis kelamin perempuan dalam kelompok informasi masyarakat yang dibina	71 kelompok	200.000.000	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Diskominfo	jumlah pengurus berjenis kelamin perempuan dalam kelompok informasi masyarakat yang dibina	71 kelompok	200.000.000	
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Diskominfo	jumlah organisasi yang terlibat dalam penyebarluasan informasi	3 organisasi	230.000.000	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Diskominfo	jumlah organisasi yang terlibat dalam penyebarluasan informasi	3 organisasi	50.000.000	
	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Diskominfo	persentase OPD yang memanfaatkan telematika	100%	3.583.000.000	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Kab. Luwu Timur	persentase OPD yang memanfaatkan telematika	100%	2.995.000.000	
	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo	persentase pengelolaan nama domain pemerintahan daerah	100%	2.850.000.000	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Luwu Timur	persentase pengelolaan nama domain pemerintahan daerah	100%	2.345.000.000	
	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo	Jumlah nama domain dan sub domain yang dibina dalam pengelolaan konten website	41 OPD	150.000.000	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Luwu Timur	Jumlah nama domain dan sub domain yang dibina dalam pengelolaan konten website	41 OPD	95.000.000	
	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Diskominfo	Jumlah Jaringan Internet yang dikembangkan dan dipelihara lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur	110 Lokasi	2.700.000.000	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kab. Luwu Timur	Jumlah Jaringan Internet yang dikembangkan dan dipelihara lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur	110 Lokasi	2.250.000.000	
	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo	persentase pengelolaan pemerintahan berbasis e-governmet yang dikelola	100%	733.000.000	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	OPD	persentase pengelolaan pemerintahan berbasis e-governmet yang dikelola	100%	650.000.000	

	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Diskominfo	Jumlah aplikasi E-Government yang dikembangkan (Aplikasi)	4 aplikasi	590.000.000	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	OPD	Jumlah aplikasi E-Government yang dikembangkan (Aplikasi)	4 aplikasi	590.000.000	
	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kab/Kota cerdas dan Kota cerdas	Diskominfo	jumlah aplikasi yang mendukung program smart city luwu timur	4 aplikasi	143.000.000	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kab/Kota cerdas dan Kota cerdas	Kab. Luwu Timur	jumlah aplikasi yang mendukung program smart city luwu timur	4 aplikasi	60.000.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Diskominfo	persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data statistik dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah	100%	790.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Kab. Luwu Timur	persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data statistik dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah	100%	250.000.000	
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo	persentase data statistik sektoral kabupaten yang tersusun	100%	790.000.000	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Luwu Timur	persentase data statistik sektoral kabupaten yang tersusun	100%	250.000.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Diskominfo	Jumlah data /informasi/ statistik sektoral daerah yang tersusun	210 buku	670.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Kab. Luwu Timur	Jumlah data /informasi/ statistik sektoral daerah yang tersusun	210 buku	130.000.000	
	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Diskominfo	Jumlah dokumen pengelolaan data perencanaan pembangunan daerah	50 buku		120.000.000	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Kab. Luwu Timur	Jumlah dokumen pengelolaan data perencanaan pembangunan daerah	50 buku	120.000.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Diskominfo	Persentase Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintahan daerah yang diselenggarakan	100%	90.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		Persentase Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintahan daerah yang diselenggarakan	100%	500.000.000	
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo	Persentase penyelenggaraan pengamanan data dan informasi elektronik	100%	90.000.000	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo	Persentase penyelenggaraan pengamanan data dan informasi elektronik	100%	500.000.000	
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo	Jumlah Perangkat, Aplikasi dan Informasi yang diamankan	10 aplikasi	90.000.000	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo	Jumlah Perangkat, Aplikasi dan Informasi yang diamankan	10 aplikasi	80.000.000	
;JUMLAH					12.938.500.000					11.544.000.000	

Tabel 5
RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PAGU INDIKATIF DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN TAHUN 2023
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024

No	Kode Rek.	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Sumber Dana	Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
				2023 (Tahun N)		2024 (Tahun N+1)				
				target	Rp	target	Rp			
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10
1	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan sesuai standar (%)	100%	4.949.000.000	100%	5.206.500.000	PAD	Diskominfo-SP	Kab.Luwu Timur
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu (%)	100%	107.500.000	100%	110.000.000	PAD	Diskominfo-SP	Kab.Luwu Timur
	2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	3 Dok	55.000.000	3 Dok	48.000.000	PAD	Diskominfo-SP	Kab.Luwu Timur
	2.16.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	2 Dok	3.750.000	2 Dok	7.000.000	PAD	Diskominfo-SP	Kab.Luwu Timur
	2.16.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	2 Dok	3.750.000	2 Dok	7.000.000	PAD	Diskominfo-SP	Kab.Luwu Timur
	2.16.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	8 dok	45.000.000	8 dok	48.000.000	PAD	Diskominfo-SP	Kab.Luwu Timur
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik (%)	100%	3.100.000.000	100%	3.450.000.000	DAU	Diskominfo-SP	Kab.Luwu Timur
	2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai/PNS yang dibayarkan Gaji dan Tunjangan	22 org	3.045.000.000	25 org	3.390.000.000	PAD	Diskominfo-SP	Kab.Luwu Timur
	2.16.01.2.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun (Dokumen)	18 Dok	55.000.000	18 Dok	60.000.000	PAD	Diskominfo-SP	Kab.Luwu Timur
	2.16.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar (%)	100%	22.000.000	100%	22.500.000	PAD	Diskominfo-SP	Kab.Luwu Timur
	2.16.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang tersusun	2 Dok	22.000.000	2 Dok	22.500.000	PAD	Diskominfo-SP	Kab.Luwu Timur
	2.16.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Kewenangan PD (%)	100%	115.000.000	100%	68.000.000	PAD	Diskominfo-SP	Kab.Luwu Timur
	2.16.01.2.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Kebijakan Retribusi Daerah yang disusun	1 Dok	65.000.000	1 Dok	68.000.000	PAD	Diskominfo-SP	Kab.Luwu Timur
	2.16.01.2.04.06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah dokumen laporan penetapan wajib retribusi daerah (Dokumen)	1 Dok	50.000.000	-	-	PAD	Diskominfo-SP	Kab.Luwu Timur
	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai PD yang dilayani (%)	100%	75.000.000	100%	200.000.000	PAD	Diskominfo-SP	Kab.Luwu Timur

	2.16.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dinas Komunikasi dan Informatika)	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian yang tersusun dan dikelola	12 Dok	25.000.000	12 Dok	25.000.000	PAD	Diskominfo-SP	Kab.Luwu Timur
	2.16.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang melaksanakan Bimbingan teknis Impeementasi Peraturan Perundang-Undangan	22 org	50.000.000	25 org	175.000.000	PAD	Diskominfo-SP	Kab.Luwu Timur
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar (%)	100%	369.500.000	100%	380.000.000	PAD	Diskominfo-SP	Kab.Luwu Timur
	2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Alat Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor yang disediakan	8 jenis	25.000.000	8 jenis	3.000.000	PAD	Diskominfo-SP	Kab.Luwu Timur
	2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	5 jenis	13.000.000	5 jenis	14.000.000	PAD	Diskominfo-SP	Kab.Luwu Timur
	2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang cetak dan/atau penggandaan yang disediakan (jenis)	2 jenis	22.000.000	2 jenis	23.000.000	PAD	Diskominfo-SP	Kab.Luwu Timur
	2.16.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Dinas Komunikasi dan Informatika)	Jumlah Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	60 eks	5.000.000,00	60 eks	10.000.000	PAD	Diskominfo-SP	Kab.Luwu Timur
	2.16.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi (Orang)	50 org	17.000.000	50 org	19.000.000	PAD	Diskominfo-SP	Kab.Luwu Timur
	2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dilaksanakan	45 kali	287.500.000	45 kali	311.000.000	PAD	Diskominfo-SP	Kab.Luwu Timur
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	pesentase pengadaan barang milik daerah yang diadakan	100%	485.000.000	100%	485.000.000	PAD	Diskominfo-SP	Kab.Luwu Timur
	2.16.01.2.07.05	Pengadaan Mebel (Dinas Komunikasi dan Informatika)	Jumlah Mebel yang disediakan	9 unit	15.000.000	9 unit	15.000.000	PAD	Diskominfo-SP	Kab.Luwu Timur
	2.16.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang disediakan	7 unit	55.000.000	7 unit	55.000.000	PAD	Diskominfo-SP	Kab.Luwu Timur

2.16.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung kantor dan Bangunan lainnya yang disediakan	3 unit	415.000.000	3 unit	415.000.000	PAD	Diskominfo-SP	Kab.Luwu Timur
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100%	379.000.000,00	100%	408.000.000	PAD	Diskominfo-SP	Kab.Luwu Timur
2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dinas Komunikasi dan Informatika)	Jumlah kegiatan jasa surat menyurat yang terlaksana	250 kali	5.000.000	150 kali	6.000.000	PAD	Diskominfo-SP	Kab.Luwu Timur
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa air dan listrik yang dibayarkan	24 rek	110.000.000	24 rek	120.000.000	PAD	Diskominfo-SP	Kab.Luwu Timur
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum Kantor yang dibayarkan	13 org	264.000.000	13 org	282.000.000	PAD	Diskominfo-SP	Kab.Luwu Timur
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik (%)	100%	296.000.000	100%	83.000.000	PAD	Diskominfo-SP	Kab.Luwu Timur
2.16.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara	7 unit	36.000.000	7 unit	39.000.000	PAD	Diskominfo-SP	Kab.Luwu Timur
2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Kantor yang dipelihara	32 unit	240.000.000	32 unit	25.000.000	PAD	Diskominfo-SP	Kab.Luwu Timur
2.16.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung dan Bangunan Kantor yang terpelihara	2 unit	20.000.000	2 unit	19.000.000	PAD	Diskominfo-SP	Kab.Luwu Timur
2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah yang dipublikasikan	100%	2.850.000.000	100%	3.500.000.000	PAD	Diskominfo-SP	Kab.Luwu Timur

	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah yang dikelola	100%	2.510.000.000,00	100%	3.500.000.000	PAD	Diskominfo-SP	Kab.Luwu Timur
	2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	jumlah saluran komunikasi dan informasi yang dikelola	5 saluran	80.000.000	5 saluran	100.000.000	PAD	Diskominfo-SP	Kab.Luwu Timur
	2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	jumlah PPID yang mengikuti sosialisasi	166 orang	80.000.000	166 orang	120.000.000	PAD	Diskominfo-SP	Kab.Luwu Timur
	2.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media	jumlah mass media yang menyebarluaskan informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah	26 media	2.100.000.000	30 media	2.920.000.000	PAD	Diskominfo-SP	Kab.Luwu Timur
	2.16.02.2.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	jumlah pengurus berjenis kelamin perempuan dalam kelompok informasi masyarakat yang dibina	71 kelompok	200.000.000	71 kelompok	280.000.000	PAD	Diskominfo-SP	Kab.Luwu Timur
	2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	jumlah organisasi yang terlibat dalam penyebarluasan informasi	3 organisasi	50.000.000	3 organisasi	80.000.000	PAD	Diskominfo-SP	Kab.Luwu Timur
	2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	persentase OPD yang memanfaatkan telematika	100%	2.995.000.000	100%	5.605.000.000	PAD	Diskominfo-SP	Kab.Luwu Timur
	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	persentase pengelolaan nama domain pemerintahan daerah	100%	2.345.000.000	100%	4.850.000.000	PAD	Diskominfo-SP	Kab.Luwu Timur
	2.16.03.2.01.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah nama domain dan sub domain yang dibina dalam pengelolaan konten website	41 OPD	95.000.000	41 OPD	500.000.000	PAD	Diskominfo-SP	Kab.Luwu Timur
	2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Jaringan Internet yang dikembangkan dan dipelihara lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur	110 Lokasi	2.250.000.000	150 Lokasi	4.350.000.000	PAD	Diskominfo-SP	Kab.Luwu Timur
	2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	persentase pengelolaan pemerintahan berbasis e-governmet yang dikelola	100%	650.000.000	100%	755.000.000	PAD	Diskominfo-SP	Kab.Luwu Timur
	2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah aplikasi E-Government yang dikembangkan (Aplikasi)	4 aplikasi	590.000.000	5 aplikasi	650.000.000	PAD	Diskominfo-SP	Kab.Luwu Timur

	2.16.03.2.02.9	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kab/Kota cerdas dan Kota cerdas	jumlah aplikasi yang mendukung program smart city luwu timur	4 aplikasi	60.000.000	5 aplikasi	105.000.000	PAD	Diskominfo-SP	Kab.Luwu Timur
	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data statistik dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah	100%	250.000.000	100%	650.000.000	PAD	Diskominfo-SP	Kab.Luwu Timur
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	persentase data statistik sektoral kabupaten yang tersusun	100%	250.000.000	100%	700.000.000	PAD	Diskominfo-SP	Kab.Luwu Timur
	2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah data /informasi/ statistik sektoral daerah yang tersusun	210 buku	130.000.000	1 dok	450.000.000	PAD	Diskominfo-SP	Kab.Luwu Timur
	2.20.02.2.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah dokumen pengelolaan data perencanaan pembangunan daerah	50 buku	120.000.000	1 dok	250.000.000	PAD	Diskominfo-SP	Kab.Luwu Timur
	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintahan daerah yang diselenggarakan	100%	500.000.000	100%	400.000.000	PAD	Diskominfo-SP	Kab.Luwu Timur
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelenggaraan pengamanan data dan informasi elektronik	100%	500.000.000	100%	400.000.000	PAD	Diskominfo-SP	Kab.Luwu Timur
	2.21.02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat, Aplikasi dan Informasi yang diamankan	10 aplikasi	80.000.000	10 aplikasi	400.000.000	PAD	Diskominfo-SP	Kab.Luwu Timur
TOTAL							11.544.000.000			15.361.500.000

[]